

TESIS

**PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA: KAITANNYA DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
*PRETRIAL PROCEEDINGS IN INDONESIAN CRIMINAL
PROCEDURE LAW: ITS RELATION TO
CORRUPTION ERADICATION***



Oleh:

ADIATMA NUGROHO

NIM. 2310622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA: KAITANNYA DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
*PRETRIAL PROCEEDINGS IN INDONESIAN CRIMINAL
PROCEDURE LAW: ITS RELATION TO
CORRUPTION ERADICATION***



Oleh:

ADIATMA NUGROHO

NIM. 2310622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA: KAITANNYA DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

ADIATMA NUGROHO

NIM. 2310622045

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA: KAITANNYA DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

ADIATMA NUGROHO

NIM. 2310622045

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal 10 Juni 2025

Menyetujui:

Pembimbing 1



DR. BENIHARMONI HAREFA, SH,LL.M

NIP. 198709222018031002

Pembimbing 2



**DR. HANDAR SUBHANDI
BAKHTIAR,SH,MH,M.TR.
ADM.KES**

NIP. 199304282022031009



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA:
KAITANNYA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

ADIATMA NUGROHO

NIM. 2310622045

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 24 Juni 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

DR. BENIHARMONI HAREFA,

SH,LL.M

NIP. 198709222018031002

Pembimbing 2

DR. HANDAR SUBHANDI

BAKHTIAR,SH,MH,M.TR.ADM.KES

NIP. 199304282022031009

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

NIP. 196806081994032001



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ADIATMA NUGROHO

NIM : 2310622045

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul:
PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA:
KAITANNYA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2025

Yang membuat Pernyataan



ADIATMA NUGROHO

NIM. 2310622045

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIATMA NUGROHO

NIM. : 2310622045

Program Studi : HUKUM PIDANA Magister HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas Tesis saya yang berjudul :

PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA: KAITANNYA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juni

2025

Yang Membuat

Pernyataan,



NUGROHO

ADIATMA

NIM. 2310622045

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil‘aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,LL. Dan Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,M.H.,M.Tr.Adm.Kes. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Atik Winanti, S.H.,M.H, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Dr. Handoyo Prasetyo, S.H.,M.H. dan Dr. Irwan Triadi, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan dan ilmu yang membantu penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.
6. Narasumber dalam penelitian ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hendra Yuristiawan, S.H.M.H yang telah bersedia meluangkan waktu dan informasi yang menunjang selesainya tugas akhir Tesis ini.
7. E.Sasongko Bowo, S.H dan Puji Rahayuningsih, A.md dan adik-adik beserta keluarga besar yang selalu memberikan semangat,support,doa,nasehat dan segalanya kepada saya selama saya menempuh Pendidikan tinggi sampai jenjang ini.

8. Rosalina, S.Psi.,M.Psi., Psikolog yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, masukan dan saran serta mengarahkan saya selama pembuatan Tesis ini.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung,memberikan semangat dan support.
10. Rekan-rekan Fakultas Hukum Magister Angkatan 2023 yang selalu semangat selama menempuh Pendidikan Magister Hukum Bersama-sama.

Jakarta, 25 April 2025

Penulis

Adiatma Nugroho

ABSTRAK

PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA: KAITANNYA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Adiatma Nugroho (2310622045), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi
Bakhtiar.

Praperadilan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai mekanisme pengawasan legalitas tindakan penegak hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Dalam konteks tindak pidana korupsi, praperadilan sering digunakan sebagai celah formil untuk menggugurkan proses penyidikan, akibat belum adanya standar hukum yang tegas serta perbedaan tafsir hakim terhadap batas kewenangan, termasuk menyentuh aspek materiil yang bukan domain praperadilan. Penelitian ini mengkaji idealisasi praperadilan dengan pendekatan yuridis-normatif, berfokus pada asas *due process of law*, prioritas *lex specialis* Pasal 26A UU KPK, dan harmonisasinya dengan KUHP. Studi ini menemukan bahwa praperadilan seharusnya dibatasi sebagai *limited judicial review*, hanya menilai legalitas prosedural. Selain itu, pentingnya pembentukan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana dirancang dalam RUU KUHP turut disoroti. HPP dapat berfungsi sebagai pengawas aktif dan objektif terhadap tindakan penyidik sejak awal, sehingga mencegah pelanggaran HAM dan memperkecil potensi tersangka menggunakan celah praperadilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pedoman yudisial dibutuhkan untuk menciptakan konsistensi putusan yang adil serta mendukung efektivitas pemberantasan korupsi.

Kata kunci: praperadilan, korupsi, due process.

ABSTRACT

The Future of Pretrial Proceedings in Indonesian Criminal Procedure: Its Relevance to Anti-Corruption Efforts

Adiatma Nugroho (2310622045), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi Bakhtiar.

*Pretrial proceedings play a strategic role in Indonesia's criminal justice system as a judicial oversight mechanism to ensure the legality of law enforcement actions and the protection of suspects' human rights. In corruption cases, however, pretrial motions are often exploited as procedural loopholes to invalidate ongoing investigations due to the absence of rigid legal standards and inconsistent interpretations by judges sometimes extending into the merits of the case, which should fall outside the scope of pretrial jurisdiction. This study examines the ideal concept of pretrial review using a normative juridical approach, emphasizing the due process of law principle, the primacy of *lex specialis* under Article 26A of the Anti-Corruption Law, and its harmonization with the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research concludes that pretrial mechanisms should function solely as limited judicial review, restricted to evaluating procedural legality. Additionally, the study highlights the significance of establishing Preliminary Examination Judges (*Hakim Pemeriksa Pendahuluan*) as proposed in the Draft Criminal Procedure Code. These judges would proactively supervise investigative actions, ensuring procedural compliance and minimizing the misuse of pretrial remedies by corruption suspects. Strengthening normative frameworks and judicial guidelines is thus essential to foster coherent, fair rulings and support the integrity and effectiveness of anti-corruption law enforcement.*

Keywords : *pretrial, corruption, due process.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. ORISINALITAS PENELITIAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. KAJIAN TEORITIS	16
2.1. Teori Kepastian Hukum	16
2.2. Teori Efektivitas Hukum	18
2.3. Teori Hukum Progresif	22
2.4. Praperadilan Dalam UU No. 8 Tahun 1981	24
2.5. Konsep Praperadilan	25
2.6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29
Definisi Tindak Pidana Korupsi	29
2.7. Praperadilan Dalam Pemberantasan Tipikor	33
2.8. Dampak Praperadilan Terhadap Efektivitas Tipikor	38
B. KERANGKA PIKIR	39
2.1. Kerangka Pikir	39
C. DEFINISI OPERASIONAL	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. JENIS PENELITIAN	42
B. PENDEKATAN PENELITIAN	43
C. TIPE PENELITIAN	46
D. SIFAT PENELITIAN	47

E. SUMBER BAHAN HUKUM	47
F. TEKNIK ANALISIS	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. PENERAPAN PRAPERADILAN SAAT INI	49
1. Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	49
2. Diversifikasi Putusan Dalam Tipikor.....	51
3. Analisis Time Series Praperadilan Tipikor 2015–2025.....	56
B. KONSEP PRAPERADILAN KE DEPAN.....	59
1. Urgensi Due Process of Law.....	60
2. Arah Konsep Ideal Tipikor.....	62
3. Tantangan Penerapan di Masa Depan.....	65
4. Hakim Pemeriksa Pendahuluan	68
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	82